



Rencana Kerja (RENJA)

Tahun 2023

BIRO PEREKONOMIAN SETDA
PROVINSI JAMBI



KATA PENGANTAR

Rasa puji dan syukur dipanjatkan kepada Yang Mahakuasa karena pada akhirnya Rencana Kerja (RENJA) Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jambi.

Penyusunan Rencana Kerja ini mengacu pada Undang-Undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU-SPPN) yang dijabarkan secara teknis dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 tentang Tahapan, tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja Biro Perekonomian Setda Provinsi Jambi Tahun 2023 merupakan salah satu tahapan dari Perencanaan Pembangunan Provinsi secara keseluruhan untuk periode 1 (satu) tahun dan menjadi bahan acuan penyusunan APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran selanjutnya.

Akhir kata pada kesempatan ini disampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kerjasamanya dalam penyusunan Rencana kerja Biro Perekonomian Setda Provinsi Jambi Tahun 2023.

Meskipun sangat disadari bahwa penyusunan Rencana Kerja ini masih jauh dari kesempurnaan yang diharapkan namun besar harapan kami kiranya Rencana Kerja yang telah tersusun ini dapat bermanfaat dalam upaya peningkatan kinerja pelaksanaan Program Pembangunan Perekonomian di masa mendatang.

Demikian, terima kasih.

Jambi, Juli 2022

KEPALA BIRO PEREKONOMIAN
SETDA PROVINSI JAMBI,

JOHANSYAH, SE.ME

Pembina Utama Muda

NIP. 19700615 200003 1 003

BAB I

PENDAHULUAN

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan RENJA dilakukan dengan melaksanakan pengkajian terlebih dahulu terhadap keadaan saat ini di Biro Perekonomian Setda Provinsi Jambi Sekretariat Daerah Provinsi Jambi (Biro PRKM Setda Provinsi Jambi), evaluasi pelaksanaan RENJA Biro Perekonomian Setda Provinsi Jambi tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Biro Perekonomian Setda Provinsi Jambi.

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan RENJA SKPD yang dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup:

1. Tahap perumusan rancangan RENJA SKPD.
2. Tahap penyajian rancangan RENJA SKPD

Rencana Kerja Biro Perekonomian Tahun 2023 memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya. Dalam perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam RENJA Biro Perekonomian Setda Provinsi Jambi Tahun 2023, mengacu kepada rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD Provinsi Jambi Tahun 2022. Untuk penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD yang disusun ke dalam rancangan RENJA Biro Perekonomian Setda

Provinsi Jambi, mengacu dan selaras dengan Renstra Sekretariat Daerah (SETDA) Provinsi Jambi Tahun 2021-2026. Selanjutnya RENJA Biro PerekonomianSetda Provinsi Jambi Tahun 2021 dan 2022 dijadikan bahan dalam penyusunan RKPD Provinsi Jambi Tahun 2023 yang menjadi dasar dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4421)
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Nrgara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

7. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jambi.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023 adalah untuk mengetahui :

1. Program dan Kegiatan Biro Perekonomian Tahun 2023
2. Lokasi pelaksanaan program dan kegiatan Biro Perekonomian Tahun 2023
3. Indikator Kinerja Biro Perekonomian Tahun 2023
4. Kelompok sasaran Biro Perekonomian Tahun 2023
5. Pagu Indikatif dan Prakiraan maju Program dan Kegiatan Biro Perekonomian Tahun 2023

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Merencanakan program dan kegiatan Biro Perekonomian Tahun 2023
2. Mengevaluasi RENJA Biro Perekonomian Tahun sebelumnya
3. Mengetahui masalah, tantangan dan solusi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Biro Perekonomian Tahun sebelumnya
4. Perumusan tujuan dan sasaran Biro Perekonomian tahun 2023
5. Sebagai salah satu media pertanggung jawaban melalui penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi

1.4 Sistematika Penulisan RENJA

Rencana Kerja Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA Biro PRKM Tahun lalu dan Capaian Renstra Biro Perekonomian
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN,SASARAN,PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1.Tujuan dan Sasaran RENJA SKPD
- 3.2.Program dan Kegiatan

BAB IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Biro Perekonomian Provinsi Jambi pada tahun 2022 berasal dari APBD Daerah Provinsi Jambi. Pada Tahun Anggaran 2022 Biro Perekonomian Provinsi Jambi mendapatkan alokasi anggaran murni sebesar Rp 2.191.948.893,- (Dua milyar ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah), yang diperuntukkan baik untuk program utama dan program pendukung yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program, yang didukung oleh 2 program, 5 kegiatan dan 15 Sub Kegiatan.

Program dan kegiatan yang direncanakan pada Tahun 2023 sebagai berikut :

I. Program Administrasi Umum

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 1.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 1.3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 2.4 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 2.5 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 2.6 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 2.7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

II. Program Perekonomian dan Pembangunan

3. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koodinasi Perekonomian
 - 3.8 Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro
 - 3.9 Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro
4. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam
 - 4.10 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan
 - 4.11 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup
 - 4.12 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air
5. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD
 - 5.13 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha
 - 5.14 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah, dan Sanitasi
 - 5.15 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah

Secara keseluruhan, kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RENJA Biro Perekonomian tahun 2023 dan perkiraan capaian tahun 2024, dan realisasi Renstra Biro Perekonomian masih mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Biro Perekonomian Setda Provinsi Jambi dan/atau realisasi APBD Biro Perekonomian Setda Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel I
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Indikator Kinerja Biro Perekonomian
Tahun 2021 dan Rencana Maju Tahun 2023

Nama SKPD : Biro Perekonomian

Sekretariat Daerah Provinsi Jambi

No	Sasaran Startegis	Indikator Kinerja	tahun 2021			2023
			Target	Realisasi	% Capaian	target
1	2	3	4	5	6	7
1	Peningkatan nilai tambah sektor Perekonomian pada Struktur Ekonomi Daerah	Persentase sektor ekonomi pada pertumbuhan ekonomi	4,80%	5,39%	11%	5,00%
		Persentase sektor SDA pada struktur ekonomi	27%	99,18	36%	30%
2	Meningkatkan Pengelolaan dan Pengendalian BUMD dan BLUD	Persentase capaian kinerja BUMD dan BLUD sesuai perencanaan	70%	80,00%	11%	75%
3	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Akip	B	B	78,62%	BB
		Skor IKM Biro Perekonomian	80%	79%	98%	85%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Biro Perekonomian

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jambi, menetapkan bahwa Biro Perekonomian Setda Provinsi Jambi mempunyai tugas pokok membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang kebijakan perekonomian, sumber daya alam, penanaman modal, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Layanan Umum daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Biro Perekonomian Setda Provinsi Jambi mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang kebijakan perekonomian, sumber daya alam, penanaman modal, dan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah.
- b. Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang kebijakan perekonomian, sumber daya alam, penanaman modal, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah.
- c. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang kebijakan perekonomian, sumber daya alam, penanaman modal, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Kepala Bagian Kebijakan Perekonomian

Mempunyai tugas membantu Biro Perekonomian dalam melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di Bidang Analisis Ekonomi Makro, Analisis Ekonomi Mikro dan Tata Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kebijakan Perekonomian menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan Daerah di Bidang Analisis Ekonomi Makro, Analisis Ekonomi Mikro dan Tata Usaha
- b. Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah Bidang Analisis Ekonomi Makro, Analisis Ekonomi Mikro dan Tata Usaha
- c. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang Bidang Analisis Ekonomi Makro, Analisis Ekonomi Mikro dan Tata Usaha
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Biro Perekonomian yang berkaitan dengan tugasnya.

Subbagian Analisis Ekonomi Makro

Mempunyai Tugas :

- a. Menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang Analisis Ekonomi Makro
- b. Menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat daerah di bidang Analisis Ekonomi Makro
- c. Menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan aktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang Analisis Ekonomi Makro
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugasnya

Subbagian Analisis Ekonomi Mikro

Mempunyai Tugas :

- a. Menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang Analisis Ekonomi Mikro
- b. Menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat daerah di bidang Analisis Ekonomi Mikro
- c. Menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan aktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang Analisis Ekonomi Mikro
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugasnya

Subbagian Tata Usaha

Mempunyai Tugas :

- a. Melaksanakan pelayanan administrasi Kepegawaian
- b. Melaksanakan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan.
- c. Melaksanakan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan
- d. Melaksanakan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan
- e. Melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup biro
- f. Pelaksanaan pengumpulan dan pengelolaan bahan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKJIP DAN LPPD lingkup biro
- g. Melaksanakan pengelolaan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup biro
- h. Melaksanakan perencanaan pemeliharaan perlengkapan biro
- i. Melaksanakan perencanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
- j. Melaksanakan pembinaan Pegawai ASN dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Sumber Daya Alam

Mempunyai tugas membantu Biro Perekonomian dalam melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Sumber Daya Alam Pertanian, Kehutanan, Kelautan, Perikanan, Pertambangan, Lingkungan Hidup, Energi dan Air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Sumber Daya Alam mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di Bidang Sumber Daya Alam Pertanian, Kehutanan, Kelautan, Perikanan, Pertambangan, Lingkungan Hidup, Energi dan Air
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah Bidang Sumber Daya Alam Pertanian, Kehutanan, Kelautan, Perikanan, Pertambangan, Lingkungan Hidup, Energi dan Air
- c. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan , dampak yang diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang Bidang Sumber Daya Alam Pertanian, Kehutanan, Kelautan, Perikanan, Pertambangan, Lingkungan Hidup, Energi dan Air
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Biro Perekonomian yang berkaitan dengan tugasnya.

Subbagian Sumber Daya Alam Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan

Mempunyai Tugas :

- a. Menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang Sumber Daya Alam Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan
- b. Menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat daerah di bidang Sumber Daya Alam Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan
- c. Menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan aktor yang

mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang Sumber Daya Alam Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan

- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugasnya

Subbagian Sumber Daya Alam Pertambangan dan Lingkungan Hidup

Mempunyai Tugas :

- a. Menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang Sumber Daya Alam Pertambangan dan Lingkungan Hidup
- b. Menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Sumber Daya Alam Pertambangan dan Lingkungan Hidup
- c. Menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan aktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang Sumber Daya Alam Pertambangan dan Lingkungan Hidup
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugasnya

Subbagian Sumber Daya Alam Energi dan Air

Mempunyai Tugas :

- a. Menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang Sumber Daya Alam Energi dan Air
- b. Menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Sumber Daya Alam Energi dan Air
- c. Menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan aktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang Sumber Daya Alam Energi dan Air
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugasnya

Bagian BUMD dan BLUD

Mempunyai tugas membantu Biro Perekonomian dalam melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha, Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi, dan badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian BUMD dan BLUD mempunyai fungsi :

- e. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang badan usaha milik daerah jasa keuangan dan aneka usaha, badan usaha milik daerah air minum, limbah dan sanitasi, dan badan layanan umum daerah;
- f. Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah Bidang penanaman modal, Badan Usaha Milik Daerah, dan badan Layanan Umum Daerah, badan usaha milik daerah air minum, limbah dan sanitasi, dan badan layanan umum daerah;
- g. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang badan usaha milik daerah jasa keuangan dan aneka usaha, badan usaha milik daerah air minum, limbah dan sanitasi, dan badan layanan umum daerah;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Biro Perekonomian yang berkaitan dengan tugasnya.

Subbagian BUMD Air Minum, Limbah dan Sanitasi, Mempunyai Tugas :

- a. Menyiapkan bahan kebijakan teknis di bidang badan badan usaha milik daerah bidang air minum, limbah dan sanitasi;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan dan analisis kebijakan Daerah pengembangan badan usaha badan usaha milik daerah bidang air minum, limbah dan sanitasi;
- c. Menyiapkan bahan penyiapan rencana kerja pembinaan badan usaha milik daerah bidang air minum, limbah dan sanitasi;

- d. Menyiapkan bahan fasilitas perencanaan, pelaporan, pembinaan dan pengawasan badan usaha milik daerah bidang air minum, limbah dan sanitasi;
- e. Menyiapkan bahan pelayanan teknis administrasi badan usaha milik daerah bidang air minum, limbah dan sanitasi;
- f. Menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan rencana umum pemegang saham di bidang badan usaha milik daerah bidang air minum, limbah dan sanitasi;
- g. Menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat Gubernur bidang badan usaha milik daerah bidang air minum, limbah dan sanitasi;
- h. Menyiapkan bahan penyusunan data badan usaha milik daerah bidang air minum, limbah dan sanitasi;
- i. Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan badan usaha milik daerah bidang air minum, limbah dan sanitasi;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugasnya

Subbagian BLUD,Mempunyai Tugas :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis evaluasi badan layanan umum daerah;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi kebijakan teknis evaluasi badan layanan umum daerah;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan kebijakan evaluasi badan layanan umum daerah;
- d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan, evaluasi, analisis dan pelaporan kebijakan perencanaan, pengembangan dan kerjasama dan layanan umum daerah; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugasnya.

Dari uraian tugas pokok dan fungsi Perekonomian diatas dapat diketahui bahwa pelayanan yang diberikan oleh Biro Perekonomian lebih kepada melaksanakan perumusan kebijakan serta mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan membina penyelenggaraan kebijakan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi dibidang Kebijakan Perekonomian, SDA dan BUMD dan BLUD.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Biro Perekonomian

Biro Perekonomian Setda Provinsi Jambi sebagai salah satu unit kerja yang berada pada Sekretariat Daerah Provinsi Jambi dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jambi, menetapkan bahwa Biro Perekonomian Setda Provinsi Jambi mempunyai tugas pokok membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang kebijakan perekonomian, sumber daya alam, penanaman modal, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Layanan Umum daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Beberapa isu strategis di bidang ekonomi pembangunan dan sumber daya alam yang berkembang di Provinsi Jambi antara lain meliputi isu dibidang kurangnya infrastuktur, pengembangan industri kecil, lemahnya pengembangan pariwisata dan kebudayaan serta pengembangan potensi energi dan sumber daya alam.

Isu yang berkembang dibidang infrastruktur antara lain : Belum optimalnya pemenuhan infrastuktur pertanian. Akibat dari masih kurangnya infrastruktur penunjang transportasi dan terbatasnya akses perhubungan daerah mempengaruhi tingkat perkembangan industri kecil di Provinsi Jambi. Padahal peranan industri kecil dalam perekonomian daerah sangat penting karena mampu menyerap sebagian besar tenaga kerja sehingga dapat mewujudkan pemerataan kesempatan berusaha dan pemerataan pendapatan. Sementara itu industri kecil kenyataannya adalah sangat heterogen karena meliputi berbagai kegiatan sektor ekonomi, seperti pertanian, peternakan, perikanan, industri pengolahan, angkutan dan perdagangan serta jasa.

Belum optimalnya pemenuhan infrastuktur pertanian seperti waduk dan irigasi juga sangat mempengaruhi taraf perekonomian masyarakat Jambi karena infrastuktur ini secara langsung bersentuhan dengan kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat terutama petani.

Pemenuhan kebutuhan infrastuktur pertanian tersebut khususnya juga akan meningkatkan produksi padi sehingga akan meningkatkan ketahanan pangan Provinsi Jambi.

Dalam pengembangan potensi kepariwisataan di Provinsi Jambi belum didukung oleh keterpaduan penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana, serta kesiapan masyarakat setempat dalam menerima kunjungan wisatawan. Masih kurangnya penggalian, pelestarian dan pengembangan nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal yang luhur.

Rendahnya penyerapan dan pengembangan nilai-nilai budaya nasional maupun budaya asing yang unggul dan dapat menunjang percepatan peningkatan pembangunan daerah.lemahnya peran serta seluruh elemen masyarakat dalam upaya menggali, mengembangkan, dan melestarikan nilai-nilai budaya, serta meningkatkan kegiatan masyarakat dalam upaya pengembangan dan pelestarian kawasan budaya dan benda cagar budaya yang terkoordinasi secara sinergis dengan pemerintah.

Kurangnya even-even kebudayaan yang dinamis, unik dab berkelas yang bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan dan kecerdasan masyarakat, serta mendukung peningkatan pembangunan pariwisata daerah.

Pada bidang sumber daya alam, bahwa perkembangan struktur perekonomian Provinsi Jambi masih bertumpu pada kemampuan mengeksploitasi sumber daya alam. Potensi sumber daya alam meliputi : 1) Sumber Daya Lahan (Hutan,kebun,pertanian dan tambang/galian); 2) Sumber Daya Mineral dan; 3) Sumber Daya Air dan Kelautan (perikanan,pengairan dan air baku dan air bersih).

Pada bidang energi dan kelistrikan, pembangunan yang bertujuan memakmurkan seluruh masyarakat mengakibatkan listrik harus disediakan dalam jumlah yang cukup dan seluruh merata yaitu harus memperhatikan ratio elektrifikasi. Namun demikian pemanfaatan sumber energi harus memperhatikan cadangan energi, kebutuhan sektor lain dan pelestarian lingkungan.

Didasari dari hal-hal tersebut diatas, agar pengelolaan sumber daya mineral antara aspek pemanfaatan sumber daya alam sebagai modal pertumbuhan ekonomi (resources based economic) dengan aspek perlindungan terhadap kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagai penopang sistem kehidupan (life support system) dan upaya meningkatkan rasio desa yang dialiri listrik, maka perlu dirumuskan kebijakan energi daerah dan pengelolaan pertambangan di Provinsi Jambi.

Begitu juga dengan era reformasi, kesadaran masyarakat sudah meningkat untuk menuntut hak-hak atas lahan yang sudah digarapnya, sehingga banyak tuntutan baik berupa surat pengaduan maupun berupa aksi massa, untuk pengembalian hak mereka tidak saja di lahan perkebunan juga padalahan yang sudah ditetapkan sebagai kawasan hutan. Dalam hal ini pihak Pemerintah Provinsi sebagai pihak yang menjadi sasaran tempat pengaduan, sehingga memerlukan berbagai kebijakan untuk dapat menemukan inti permasalahan.

Oleh karena itu dengan menyadari kondisi dan permasalahan serta tantangan tersebut, sangat relevan ada peran Biro Perekonomian Setda Provinsi Jambi kedepannya, dalam rangka untuk dapat menjembatani permasalahan antara pihak yang berkepentingan melalui fungsi Fasilitator, Koordinasi dan Pemantauan.

Dengan Fasilitasi dari Biro Perekonomian Setda Provinsi Jambi melalui kebijakan yang tepat serta manajemen yang benar, efektif dan terkendali diharapkan dapat menghasilkan output yang memiliki daya saing dan optimal yang berencana serta kontinue/berkelanjutan.

Adapun tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Biro Perekonomian adalah sebagai berikut :

1. Adanya dukungan yang kuat dari Pimpinan (Asisten Sekda, Sekda dan Gubernur)
2. Adanya Kuantitas Sumber Daya Manusia yang cukup
3. Adanya kewenangan memfasilitasi, koordinasi dan pemantauan serta mengevaluasi pada bidang Perekonomi, Sumber Daya Alam dan BUMD dan BLUD

4. Adanya komitmen pimpinan dan staf untuk melaksanakan tupoksi
5. Sarana dan prasarana penunjang kerja cukup memadai
6. Memiliki anggaran/dana untuk menunjang tupoksi
7. Potensi Sumber Daya Alam yang cukup memadai
8. Adanya kerjasama dengan unit kerja terkait
9. Upaya peningkatan kompetensi SDA aparatur di daerah yang cukup besar
10. Adanya informasi yang mudah diakses

Tantangan :

1. Masih adanya personil yang kurang menguasai Tupoksinya
2. Mekanisme kerja yang kurang efektif
3. Komitmen SKPD terhadap hasil evaluasi yang cenderung rendah
4. Belum optimalnya koordinasi antar dinas/instansi terkait
5. Produk/hasil fasilitasi permasalahan belum dapat memuaskan stake holders
6. Perubahan kebijakan pemerintah
7. Perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Tujuan dan Sasaran RENJA Biro Perekonomian

Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai pada RENJA Biro Perekonomian Tahun 2022 ditetapkan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Biro Perekonomian sebagai mana tercantum dalam Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jambi.

Dalam Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2020 yang telah diuraikan pada paragraf 7 pasal 64 bahwa tujuan yang ingin dicapai pada RENJA Biro Perekonomian Setda Provinsi Jambi Tahun 2023 yaitu : **Meningkatkan pertumbuhan ekonomi.**

Sasaran dari Biro Perekonomian Setda Provinsi Jambi pada RENJA Tahun 2023 antara lain :

1. Persentase Sektor Ekonomi pada Pertumbuhan Ekonomi
2. Persentase sector SDA pada Struktur Ekonomi
3. Persentase capaian kinerja BUMD dan BLUD sesuai perencanaan
4. Nilai Akip Capaian kinerja pada akhir tahun
5. Sektor IKM Biro Perekonomian

3.2 Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Biro Perekonomian mengarah kepada perumusan kebijakan serta mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan membina penyelenggaraan kebijakan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi di bidang Kebijakan Perekonomian, SDA dan BUMD dan BLUD. Untuk tahun 2023, direncanakan akan dilaksanakan 2 program, 5 kegiatan dan 15 Sub Kegiatan sebagaimana table berikut

TABEL. 3.4. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN PROVINSI JAMBI
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2021-2026

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026					
						TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik	411	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Akip/Predikat Akip		B	#####	BB	#####	BB	#####	BB	#####	A	#####	A	#####		
		411101	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase percepatan pelayanan administrasi perkantoran	79.482.250	100%	99.352.813	100%	124.191.016	100%	155.238.770	100%	194.048.462	100%	242.560.577	100%	242.560.577	Biro Perekonomian	Jambi
		4	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	52.403.000	4 Dok	65.503.750	4 Dok	81.879.688	4 Dok	102.349.609	4 Dok	127.937.012	4 Dok	159.921.265	4 Dok	159.921.265	Biro Perekonomian	Jambi
		4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19.150.000	5 Lap	23.937.500	5 Lap	29.921.875	5 Lap	37.402.344	5 Lap	46.752.930	5 Lap	58.441.162	5 Lap	58.441.162	Biro Perekonomian	Jambi
		4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.929.250	2 Lap	9.911.563	2 Lap	12.389.453	2 Lap	15.486.816	2 Lap	19.358.521	2 Lap	24.198.151	2 Lap	24.198.151	Biro Perekonomian	Jambi
		4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase percepatan pelayanan administrasi perkantoran	348.757.600	100%	435.947.000	100%	544.933.750	100%	681.167.188	100%	851.458.984	100%	#####	100%	1.064.323.730	Biro Perekonomian	
		4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	226.711.000	5 Lap	283.388.750	5 Lap	354.235.938	5 Lap	442.794.922	5 Lap	#####	5 Lap	691.867.065	5 Lap	691.867.065	Biro Perekonomian	Jambi
		4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	38.030.000	1 Paket	47.537.500	1 Paket	59.421.875	1 Paket	74.277.344	1 Paket	92.846.680	1 Paket	116.058.350	1 Paket	116.058.350	Biro Perekonomian	Jambi

		4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	25.973.860	1 Paket	32.467.325	1 Paket	40.584.156	1 Paket	50.730.195	1 Paket	63.412.744	1 Paket	79.265.930	1 Paket	79.265.930	Biro Perekonomian	Jambi
		4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Jasa Pe															
		4	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	58.042.740	100%	72.553.425	100%	90.691.781	100%	113.364.727	100%	141.705.908	100%	177.132.385	100%	177.132.385	Biro Perekonomian	Jambi
Peningkatan nilai tambah sektor Perekonomian pada Struktur Ekonomi Daerah		4	Perekonomian dan Pembangunan	Persentase laporan Perekonomian dan Pembangunan yang dilaksanakan	#####	100%	#####	100%	#####	100%	#####	100%	#####	100%	#####	100%	#####	Biro Perekonomian	Jambi
		4	Pengelola Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Persentasi percepatan kebijakan masalah perekonomian	295.760.000	100%	369.700.000	100%	462.125.000	100%	577.656.250	100%	722.070.313	100%	902.587.891	100%	902.587.891	Biro Perekonomian	
		4	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	126.980.000	18 Dok	158.725.000	18 Dok	198.406.250	18 Dok	248.007.813	18 Dok	310.009.766	18 Dok	387.512.207	18 Dok	387.512.207	Biro Perekonomian	Jambi
		4	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	168.780.000	12 Dok	210.975.000	12 Dok	263.718.750	12 Dok	329.648.438	12 Dok	412.060.547	12 Dok	515.075.684	12 Dok	515.075.684	Biro Perekonomian	Jambi
		4	Pengelola kebijakan koordinasi SDA	Persentasi percepatan kebijakan masalah SDA	399.559.450	100%	499.449.313	100%	624.311.641	100%	780.389.551	100%	#####	100%	#####	100%	1.219.358.673	Biro Perekonomian	
		4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	142.692.700	15 Dok	178.365.875	15 Dok	222.957.344	15 Dok	278.696.680	15 Dok	#####	15 Dok	435.463.562	15 Dok	435.463.562	Biro Perekonomian	Jambi
		4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	146.066.750	10 Dok	182.583.438	10 Dok	228.229.297	10 Dok	285.286.621	10 Dok	#####	10 Dok	445.760.345	10 Dok	445.760.345	Biro Perekonomian	Jambi
		4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	110.800.000	12 Dok	138.500.000	12 Dok	173.125.000	12 Dok	216.406.250	12 Dok	270.507.813	12 Dok	338.134.766	12 Dok	338.134.766	Biro Perekonomian	Jambi

Meningkatkan Pengelolaan dan Pengendalian BUMD dan BLUD		Pengelolaan Kebijakan dan koordinasi BUMD dan BLUD	Persentasi percepatan kebijakan masalah BUMD dan BLUD															Biro Perekonomian	
	4			693.440.590	100%	866.800.738	100%	#####	100%	#####	100%	#####	100%	#####		2.116.212.738			
	4	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	155.840.000	15 Dok	194.800.000	15 Dok	243.500.000	15 Dok	304.375.000	15 Dok	#####	15 Dok	475.585.938	15 Dok	475.585.938		Biro Perekonomian	Jambi
	4	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	426.800.590	12 Dok	533.500.738	12 Dok	666.875.922	12 Dok	833.594.902	12 Dok	#####	12 Dok	#####	12 Dok	1.302.492.035		Biro Perekonomian	Jambi
	4	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Jumlah Dokumen Bidang BLUD yang difasilitasi di Provinsi Jambi	110.800.000	10 Dok	138.500.000	10 Dok	173.125.000	10 Dok	216.406.250	10 Dok	270.507.813	10 Dok	338.134.766	10 Dok	338.134.766		Biro Perekonomian	Jambi

Jambi, Januari 2022
Kepala Biro Perekonomian

Johansyah, S.E.,M.E
NIP. 19700615 200003 1 003

Tabel 4
Rencana Program dan Kegiatan Biro Perekonomian Tahun 2023
Dan Perkiraan Maju tahun2024
Provinsi Jambi

KODE						Urusan/Bidang urusan Pemerintahan		Indikator kinerja, Tujuan sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (outcome)		RENCANA TAHUN 2023				Catatan Penting	Perkiraan maju Rencana Tahun 2024	
						PROGRAM	KEGIATAN	PROGRAM	KEGIATAN	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu (Rp)
1						2		3		4	5	6	7	8	9	10
						Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Nilai Akip/Predikat Akip		PRKM	BB	669.124.766	APBD		BB	836.405.958
								Skor IKM Biro Perekonomian		PRKM	80%		APBD		85%	
4	1	1						Persentase Percepatan Pelayanan Administrasi Perkantoran		PRKM	100%	669.124.766	APBD		100%	836.405.958
4	1	1	101				Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		persentase percepatan pelayanan administrasi perkantoran	PRKM	100%	124.191.016	APBD		100%	155.238.770
4	1	1	101	1				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PRKM	4 Dok	81.879.688	APBD		4 Dok	102.349.609
4	1	1	101	6				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	PRKM	5 Lap	29.921.875	APBD		5 Lap	37.402.344
4	1	3	101	7				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PRKM	2 Lap	12.389.453	APBD		2 Lap	15.486.816
4	1	1	106				Administrasi Umum Perangkat Daerah		persentase percepatan pelayanan administrasi perkantoran	PRKM	100%	544.933.750	APBD		100%	681.167.188
4	1	1	106	9				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PRKM	5 Lap	354.235.938	APBD		5 Lap	442.794.922

4	1	1	106	4			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	PRKM	1 Paket	59.421.875	APBD		1 Paket	74.277.344
4	1	1	106	5			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	PRKM	1 Paket	40.584.156	APBD		1 Paket	50.730.195
4	1	1	103	3			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	PRKM	100%	90.691.781	APBD		100%	113.364.727
							Persentase Sektor Ekonomi pada Pertumbuhan Ekonomi		PRKM	5,00%	462.125.000	APBD		5,00%	577.656.250
							Persentase Sektor SDA pada Struktur Ekonomi		PRKM	30%	624.311.641	APBD		35%	780.389.551
4	1	6				Perekonomian dan Pembangunan	Persentase laporan Perekonomian dan Pembangunan yang dilaksanakan		PRKM	100%	2.169.937.563	APBD		100%	2.712.421.953
4	1	6	101				Pengelola Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Persentase percepatan kebijakan masalah perekonomian	PRKM	100%	462.125.000	APBD		100%	577.656.250
4	1	6	101	1			Terlaksananya Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	PRKM	18 Dok	198.406.250	APBD		18 Dok	248.007.813
4	1	6	101	2			Terlaksananya Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	PRKM	12 Dok	263.718.750	APBD		12 Dok	329.648.438
4	1	6	102	2			Pengelola kebijakan koordinasi SDA	Persentase percepatan kebijakan masalah SDA	PRKM	100%	624.311.641	APBD		100%	780.389.551
4	1	6	102	1			Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	PRKM	15 Dok	222.957.344	APBD		15 Dok	278.696.680
4	1	6	102	2			Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	PRKM	10 Dok	228.229.297	APBD		10 Dok	285.286.621
4	1	6	102	3			Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	PRKM	12 Dok	173.125.000	APBD		12 Dok	216.406.250

					Persentase capaian kinerja BUMD dan BLUD sesuai perencanaan				PRKM	70%	1.083.500.922	APBD		75%	1.354.376.152
4	1	6	103			Pengelolaan Kebijakan dan koordinasi BUMD dan BLUD		Persentasi percepatan kebijakan masalah BUMD dan BLUD	PRKM		1.083.500.922	APBD			1.354.376.152
4	1	6	103	1			Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	PRKM	15 Dok	243.500.000	APBD		15 Dok	304.375.000
4	1	6	103	2			Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	PRKM	12 Dok	666.875.922	APBD		12 Dok	833.594.902
4	1	6	103	4			Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan	Jumlah Dokumen Bidang BLUD yang difasilitasi di Provinsi Jambi	PRKM	10 Dok	173.125.000	APBD		10 Dok	216.406.250

BAB 4

P E N U T U P

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD). Adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, RENJA-SKPD disusun dengan mempedomani Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP), diantaranya memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja Biro Perekonomian Setda Provinsi Jambi tahun 2023 ini merupakan pedoman dalam melaksanakan kegiatan yang menjadi tanggung jawab biro, dan diharapkan dapat memberikan solusi dalam setiap gerak dan langkah yang akan ditempuh, agar tidak terjadinya berbagai hambatan. Rencana kerja ini secara umum menguraikan program kegiatan Kerja Biro Perekonomian Setda Provinsi Jambi serta indikator kinerja untuk program yang dinyatakan dalam sasaran hasil (outcomes).

Esensinya, dengan mempedomani Rencana Kerja ini dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan yang telah terhutang dalam DPA Kerja Biro Perekonomian Setda Provinsi Jambi, dapat terlaksananya Tupoksi dalam upaya meningkatkan kinerja Biro Perekonomian, terutama dalam mengoptimalkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota khususnya dan dapat mendukung pencapaian Jambi Mantap 2023.

Jambi, Juli 2022
KEPALA BIRO PEREKONOMIAN ,

JOHANSYAH, S.E., M.E
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP.19700615 200003 1 003